



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 20244 /Kep-DPRD/12/2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
 - b. bahwa hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan antara DPRD Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Medan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1092);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertub Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan (Lembaran Daerah kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 13 Desember 2022;
 2. Rapat Paripurna tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan (Propemperda) Tahun 2023 Tanggal 20 Desember 2022;

MEMUTUSKAN

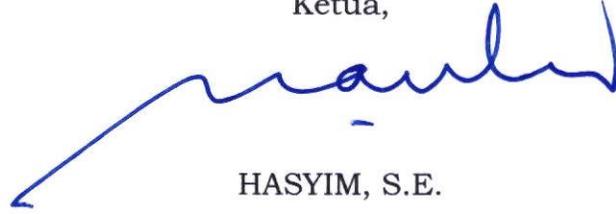
Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan Tahun 2023 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 20 Desember 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Ketua,



HASYIM, S.E.

Wakil Ketua,



H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.

Wakil Ketua,



H. RAJUDDIN SAGALA, SPd.I.

Wakil Ketua,



H. T. BHRUMSYAH, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Wali Kota Medan
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
 NOMOR : 171/2022
 TANGGAL : 20 DESEMBER 2022
 TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
 TAHUN 2023.

1. RANPERDA KOMULATIF TERBUKA 2023

NO	RANPERDA	KETERANGAN
1.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2022;	KUMULATIF TERBUKA
2.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023;	KUMULATIF TERBUKA
3.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2024;	KUMULATIF TERBUKA

2. RANPERDA DAFTAR PRIORITAS TAHUN 2023

NO	RANPERDA	KETERANGAN
1.	RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	PEMKO MEDAN
2.	RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015-2035	PEMKO MEDAN
3.	RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PENYELANGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;	PEMKO MEDAN
4.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG KETAHANAN PANGAN	INISIATIF DPRD
5.	RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH;	INISIATIF DPRD

6.	RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MEDAN (RPIK) TAHUN 2021-2041;	PEMKO MEDAN
7.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KOTA MEDAN;	INISIATIF DPRD
8.	RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG REVISI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN;	INISIATIF DPRD
9.	RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEAGAMAAN MASYARAKAT KOTA MEDAN;	INISIATIF DPRD
10.	RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN;	PEMKO MEDAN
11.	RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN	INISIATIF DPRD
12.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN PENYAKIT MENULAR UDARA	INISIATIF DPRD
13.	RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	PEMKO MEDAN
14.	RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN.	PEMKO MEDAN
15.	RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026	PEMKO MEDAN
16.	RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN	PEMKO MEDAN
17.	RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KOTA MEDAN TAHUN 2022-2025	PEMKO MEDAN
18.	RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK	PEMKO MEDAN
19.	RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	PEMKO MEDAN

19.	RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH	PEMKO MEDAN
20.	RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	INISIATIF DPRD
21.	RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	INISIATIF DPRD

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 20 Desember 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Ketua,



HASYIM, S.E.

Wakil Ketua,



H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.

Wakil Ketua,



H. RAJUDDIN SAGALA, SPd.I.

Wakil Ketua,



H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Wali Kota Medan
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan